

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH (RENJA-P 2019)



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan tindak lanjut penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023. Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat dari dampak Bencana. Di sisi lain, dalam era globalisasi, BPBD Kabupaten Nganjuk dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, berpihak kepada masyarakat terhadap dari dampak bencana, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagaimana yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

Proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 didasarkan kepada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta Lembaga International dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana ;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Bupati Tahun 10 Tahun 2012 Tentang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2013

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2019.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Nganjuk, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan dan Tugas Pokok dan Fungsi.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pemberdayaan masyarakat tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses pemberdayaan masyarakat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Pemberdayaan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan dalam mengatasi dampak penanggulangan bencana. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan dalam mengatasi / penanggulangan bencana pada masyarakat secara menyeluruh. Kondisi daerah Kabupaten Nganjuk terkait dengan urusan penanggulangan bencana salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

- **Ketersediaan Dokumen Perencanaan**

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018, pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dalam tabel berikut sebagai berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2019

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasikerja program dan kegiatan SKPD Tahun lalu n-2 (2017)			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Prakiraan realiasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s.d. tahun 2018 (tahunin berjalan/n-1)		Catatan
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11= (10/4)	12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) internal Perangkat Daerah	79,75%								
Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses	1500 surat	956 surat	1100 surat	1098 surat	99	1250 surat	3.304	2,20	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan telepon dan listrik	21600 kwh, 600 Mbps	21600 kwh, 600 Mbps	21600 kwh, 600 Mbps	21600 kwh, 600 Mbps	100	21600 kwh, 600 Mbps	21000 kwh, 600 Mbps	100	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	31 jenis	31 jenis	31 jenis	31 jenis	100	31 jenis	93	3	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	21	3	
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100	9 jenis	27	3	
Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	3	3	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	3	1	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	70 kali	50 kali	60 kali	60 kali	100	64 kali	174	2,48	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring dan evaluasi dalam daerah yang dilakukan	165 kali	100 kali	150 kali	150 kali	100	247 kali	497	3,01	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	82%								
Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	1 unit				100	1 unit	1	100	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	12	3	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasikerja program dan kegiatan SKPD Tahun lalu n-2 (2017)			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Prakiraan realiasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s.d. tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11= (10/4)	12
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	12	3	
Pengadaan meubeler	Jumlah pengadaan meubeler	6 jenis				100				
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	± 340 m2	± 340 m2	± 340 m2	± 340 m2	100	± 340 m2	± 340 m2	100	
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	23 unit				100				
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	6	3	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis				100				
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	6 jenis	5 jenis	6 jenis	6 jenis	100	6 jenis	17	2,83	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	81%								
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	4 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	24	6	
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang selesai tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6	3	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	12	12	
Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan, Pencegahan dan mitigasi Bencana	Jumlah desa tangguh bencana, Persentase pemenuhan ogistic dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai, Persentase Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini/Early Warning System (EWS) bencana	40 desa 80% 75%								
Bimbingan teknis kesiapsiagaan / mitigasi	Jumlah pelajar paham tehnik PRB dan Kesiapsiagaan pada Lokasi	260 peserta								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasikerja program dan kegiatan SKPD Tahun lalu n-2 (2017)			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Prakiraan realiasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s.d. tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11= (10/4)	12
bencana	Rawan Bencana									
Penanganan Mitigasi Struktural pra bencana pada DESTANA	Jumlah kegiatan mitigasi pada lokasi desa rawan bencana	10 desa	2 desa	10 desa	10 desa	100	10 desa	30	3	
Penguatan Kapasitas Relawan Masyarakat penanggulangan bencana	Jumlah Relawan yang mengikuti	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100	60 orang	120	3	
Pelaksanaan aktivasi posko siaga/darurat bencana	Jumlah posko	2 posko	2 posko	2 posko	2 posko	100	2 posko	6	3	
Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Jumlah desa tangguh yang terbentuk	40 desa	2 desa	10 desa	10 desa	100	10 desa	30	3	
Pengadaan tenda dan perlengkapan	Jumlah tenda dan perlengkapan yang diadakan	7 unit	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Nasional	Jumlah kegiatan dalam Hari Kesiapsiagaan Nasional	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	12	3	
Diklat teknis penanggulangan bencana (Metode Out bound)	Jumlah peserta diklat	60 org	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan prasarana dasar mitigasi pada penanganan pra bencana	Jumlah prasarana dasar	2 jenis	-	-	-	-	-	-	-	
Program Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat penanggulangan bencana	Persentase korban selamat akibat bencana,	70%								
	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana	80%								
Pengadaan prasarana dasar tanggap darurat bencana	Jenis sarana dasar yang disediakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	4 jenis	10	3,33	
Penguatan Sistem Komando Pusat Pengendalian Operasi penanganan bencana	Jumlah tenaga dan kejadian yang tertangani	25 org	25 org	25 org	25 org	100	25 org	75	3	
Operasi Penanganan, Kebakaran hutan dan lahan	Jumlah sarana pendukung kegiatan karhutla yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	6	3	
Operasi Penanganan tanggap darurat kekeringan (dropping air bersih)	Jumlah bantuan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	6	3	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasikinerja program dan kegiatan SKPD Tahun lalu n-2 (2017)			Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2018	Prakiraan realiasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s.d. tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11= (10/4)	12
Pemenuhan kebutuhan dasar tanggap darurat	Jumlah bantuan dasar tanggap darurat bencana yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	6	3	
Sarana Prasarana penyediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan	Jumlah prasarana penanganan darurat yang tersedia pada wilayah rawan kekeringan	2 prasarana	2 prasarana	2 prasarana	2 prasarana	100	2 prasarana	6	3	
Pengadaan peralatan rescue	Jumlah peralatan rescue	7 jenis	-	-	-	-	-	-	-	
Program Peningkatan Kapasitas Penanganan Pasca Bencana	Persentase perbaikan sarana dan prasarana vital daerah terdampak bencana	45%								
Penyediaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah sarana dan pemukiman dampak bencana yang direhabilitasi	5 sarana	-	-	-	-	20 sarana	5	4	
Bimtek penilaian kebutuhan pasca bencana bagi pokja/relawan destana	Jumlah peserta bimtek	44 orang	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk saat ini termasuk dalam kategori urusan pemerintahan fungsi penunjang karena itu perlu adanya suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi. Oleh karena itu guna memenuhi kinerja pelayanan sebagaimana tersebut diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menentukan indikator kerjanya didasarkan pada Pencegahan dan penanggulangan Bencana.

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017(tahun n-2)	Tahun 2018(tahun n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020(tahun n+1)	Tahun 2017(tahun n-2)	Tahun 2018 (tahun n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase desa tangguh bencana			2%	12%	52%	64%	100%	100%	52	64	
2	Persentase kejadian bencana yang direspn dalam waktu tanggap			78%	80%	80%	82%	100%	100%	80%	82%	
3	Persentase pemulihan daerah terdampak bencana			80%	80,2%	82%	84%	56,25 %	41,5%	82%	84%	

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Ex Efficio.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, sedangkan fungsinya:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
2. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana , terpadu dan menyeluruh ;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2019 berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kabupaten Nganjuk

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuh-an Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPBD	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,75%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPBD	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,75%		
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	BPBD	Jumlah surat yang diproses	1500	1.800	Penyediaan Jasa surat menyurat	BPBD	Jumlah surat yang diproses	1500	1.800	
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	BPBD	Jumlah kebutuhan telepon dan listrik	21600 kwh, 600 Mbps	40.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	BPBD	Jumlah kebutuhan telepon dan listrik	21600 kwh, 600 Mbps	46.000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPBD	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	31 jenis	26.400	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPBD	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	31 jenis	26.400	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	10.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPBD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	10.000	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BPBD	Jumlah kebutuhan alat listrik	9 jenis	7.000	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BPBD	Jumlah kebutuhan alat listrik	9 jenis	7.000	
6	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	BPBD	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	1 jenis	4.800	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	BPBD	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	1 jenis	5.500	
7	Penyediaan makanan dan minuman	BPBD	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	1 jenis	28.500	Penyediaan makanan dan minuman	BPBD	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	1 jenis	38.500	
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPBD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	70 kali	240.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPBD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	70 kali	300.000	

9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPBD	Jumlah Monitoring dan evaluasi dalam daerah yang dilakukan	165 kali	10.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BPBD	Jumlah Monitoring dan evaluasi dalam daerah yang dilakukan	165 kali	30.000	
B	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	BPBD	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	82%		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	BPBD	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	82%		
1	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	BPBD	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	1 unit	425.000	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	BPBD	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	1 unit	578.000	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPBD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	4 jenis	30.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPBD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	4 jenis	91.000	
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPBD	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 jenis	28.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPBD	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 jenis	28.000	
4	Pengadaan meubeler	BPBD	Jumlah pengadaan meubeler	3 jenis	15.000	Pengadaan meubeler	BPBD	Jumlah pengadaan meubeler	3 jenis	41.500	
5	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	BPBD	Luas gedung kantor yang dipelihara	± 340 m2	50.000	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	BPBD	Luas gedung kantor yang dipelihara	± 340 m2	265.000	
6	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	BPBD	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	19 unit	165.000	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	BPBD	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	19 unit	185.000	
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPBD	Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	5.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPBD	Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	5.000	
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPBD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	6.500	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPBD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	6.500	
9	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BPBD	Jumlah mebeleur yang dipelihara	6 jenis	5.000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BPBD	Jumlah mebeleur yang dipelihara	6 jenis	5.000	
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPBD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	81%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPBD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	81%		
1	Penyusunan laporan capaian	BPBD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat	8 dokumen	15.000	Penyusunan laporan capaian	BPBD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat	4 dokumen	15.000	

	kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD		waktu			kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD		waktu			
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	BPBD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang selesai tepat waktu	2 dokumen	3.500	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	BPBD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang selesai tepat waktu	2 dokumen	3.500	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BPBD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	4 dokumen	3.500	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BPBD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	1 dokumen	3.500	
D	Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	BPBD	Jumlah desa tangguh bencana	10		Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	BPBD	Jumlah desa tangguh bencana	40		
		BPBD	Persentase pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	80			BPBD	Persentase pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	80		
		BPBD	Persentase Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini/Early Warning System (EWS) bencana	75			BPBD	Persentase Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini/Early Warning System (EWS) bencana	75		
1	Bimbingan teknis kesiapsiagaan / mitigasi bencana	BPBD	Jumlah pelajar paham tehnis PRB dan Kesiapsiagaan pada Lokasi Rawan Bencana	260 peserta	100.000	Bimbingan teknis kesiapsiagaan / mitigasi bencana	BPBD	Jumlah pelajar paham tehnis PRB dan Kesiapsiagaan pada Lokasi Rawan Bencana	260 peserta	100.000	
2	Penanganan Mitigasi Struktural pra bencana pada DESTANA	BPBD	Jumlah kegiatan mitigasi pada lokasi desa rawan bencana	10 desa	50.000	Penanganan Mitigasi Struktural pra bencana pada DESTANA	BPBD	Jumlah kegiatan mitigasi pada lokasi desa rawan bencana	10 desa	50.000	
3	Penguatan Kapasitas Relawan Masyarakat penanggulangan bencana	BPBD	Jumlah Relawan yang mengikuti	30 orang	100.000	Penguatan Kapasitas Relawan Masyarakat penanggulangan bencana	BPBD	Jumlah Relawan yang mengikuti	30 orang	100.000	
4	Pelaksanaan aktivasi posko siaga/darurat bencana	BPBD	Jumlah posko	2 posko	60.000	Pelaksanaan aktivasi posko siaga/darurat bencana	BPBD	Jumlah posko	2 posko	60.000	
5	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	BPBD	Jumlah desa tangguh yang terbentuk	10 desa	425.000	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	BPBD	Jumlah desa tangguh yang terbentuk	40 desa	1.031.000	

	(DESTANA)					(DESTANA)					
6	Pengadaan tenda dan perlengkapan	BPBD	Jumlah tenda dan perlengkapan yang diadakan	7 unit	50.000	Pengadaan tenda dan perlengkapan	BPBD	Jumlah tenda dan perlengkapan yang diadakan	7 unit	50.000	
7	Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Nasional	BPBD	Jumlah kegiatan dalam Hari Kesiapsiagaan Nasional	4 kegiatan	50.000	Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Nasional	BPBD	Jumlah kegiatan dalam Hari Kesiapsiagaan Nasional	4 kegiatan	50.000	
8	Diklat teknis penanggulangan bencana (Metode Out bound)	BPBD	Jumlah peserta diklat	60 org	100.000	Diklat teknis penanggulangan bencana (Metode Out bound)	BPBD	Jumlah peserta diklat	60 org	100.000	
						Penyediaan prasarana dasar mitigasi pada penanganan pra bencana	BPBD	Jumlah prsarana dasar	2 jenis	50.000	
E	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD	Persentase korban selamat akibat bencana	70		Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD	Persentase korban selamat akibat bencana	70		
		BPBD	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana	80			BPBD	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana	80		
1	Pengadaan prasarana dasar tanggap darurat bencana	BPBD	Jenis sarana dasar yang disediakan	3 jenis	200.000	Pengadaan prasarana dasar tanggap darurat bencana	BPBD	Jenis sarana dasar yang disediakan	3 jenis	200.000	
2	Penguatan Sistem Komando Pusat Pengendalian Operasi penanganan bencana	BPBD	Jumlah tenaga dan kejadian yang tertangani	25 org	600.000	Penguatan Sistem Komando Pusat Pengendalian Operasi penanganan bencana	BPBD	Jumlah tenaga dan kejadian yang tertangani	25 org	629.850	
3	Operasi Penanganan, Kebakaran hutan dan lahan	BPBD	Jumlah sarana pendukung kegiatan karhutla yang tersedia	2 jenis	20.000	Operasi Penanganan, Kebakaran hutan dan lahan	BPBD	Jumlah sarana pendukung kegiatan karhutla yang tersedia	2 jenis	20.000	
4	Operasi Penanganan darurat kekeringan (droping air bersih)	BPBD	Jumlah bantuan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan	2 jenis	200.000	Operasi Penanganan darurat kekeringan (droping air bersih)	BPBD	Jumlah bantuan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan	2 jenis	200.000	

5	Pemenuhan kebutuhan dasar tanggap darurat	BPBD	Jumlah bantuan dasar tanggap darurat bencana yang tersedia	2 jenis	60.000	Pemenuhan kebutuhan dasar tanggap darurat	BPBD	Jumlah bantuan dasar tanggap darurat bencana yang tersedia	2 jenis	100.000	
6	Sarana Prasarana penyediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan	BPBD	Jumlah prasarana penanganan darurat yang tersedia pada wilayah rawan kekeringan	2 prasarana	450.000	Sarana Prasarana penyediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan	BPBD	Jumlah prasarana penanganan darurat yang tersedia pada wilayah rawan kekeringan	2 prasarana	450.000	
						Pengadaan peralatan rescue	BPBD	Jumlah peralatan yang dibutuhkan	7 jenis	220.000	
F	Program Penanganan Pasca Bencana	BPBD	Persentase perbaikan sarana dan prasarana vital daerah terdampak bencana	45%		Program Penanganan Pasca Bencana	BPBD	Persentase perbaikan sarana dan prasarana vital daerah terdampak bencana	45%		
1	Penyediaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	BPBD	Jumlah sarana dan pemukiman dampak bencana yang direhabilitasi	5 sarana	50.000	Penyediaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	BPBD	Jumlah sarana dan pemukiman dampak bencana yang direhabilitasi	5 sarana	50.000	
						Bimtek penilaian kebutuhan pasca bencana bagipokja/relawan destana	BPBD	Jumlah peserta bimtek	44 orang	70.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007), terutama Pasal 36, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan mandatnya menyiapkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2015-2019. RENAS PB 2015-2019 bertujuan untuk memberikan acuan kepada K/L dan Non K/L, serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

RENAS PB 2015-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang selaras dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, RPJMN III dan Misi Presiden 2015-2019 (Nawa Cita). Nawa Cita merupakan sembilan agenda prioritas dari Pemerintah Indonesia 2015-2019. Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk sejalan dengan agenda Nawa Cita khususnya agenda pertama dan ketiga yaitu :

Pertama : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Artinya, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, dalam menghadapi ancaman bencana.

Ketiga : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan. Artinya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melalui pengembangan program Desa Tangguh Bencana dan penguatan kapasitas lokal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja BPBD Kabupaten Nganjuk adalah : **Tangguh dalam menghadapi bencana.**

Dengan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana ;
3. Meningkatnya pemulihan pasca bencana;

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kabupaten Nganjuk dalam 5 (lima) tahun kedepan pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023. Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat adalah visi Bupati yang mengarahkan kepada BPBD Kabupaten Nganjuk untuk terus maju menjalankan program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		79,75%					
Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses		1500 surat	1.800.000	APBD		1500 surat	2.000.000
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan telepon dan listrik		21600 kwh, 600 Mbps	40.000.000	APBD		21600 kwh, 600 Mbps	46.800.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan		31 jenis	26.400.000	APBD		31 jenis	26.400.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		7 jenis	10.000.000	APBD		7 jenis	10.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik		9 jenis	7.000.000	APBD		9 jenis	7.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan		1 jenis	4.800.000	APBD		1 jenis	5.500.000
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman		1 jenis	28.500.000	APBD		1 jenis	40.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri		70 kali	240.000.000	APBD		70 kali	280.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring dan evaluasi dalam daerah yang dilakukan		165 kali	10.000.000	APBD		165 kali	20.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		82%				85%	
Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan		1 unit	425.000.000	APBD		0 unit	750.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan		4 jenis	30.000.000	APBD		4 jenis	12.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		4 jenis	28.000.000	APBD		4 jenis	30.000.000
Pengadaan meubeler	Jumlah pengadaan meubeler		3 jenis	15.000.000	APBD		3 jenis	20.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara		± 340 m ²	50.000.000	APBD		± 340 m ²	20.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara		19 unit	165.000.000	APBD		24 unit	270.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		2 jenis	5.000.000	APBD		2 jenis	8.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		4 jenis	6.500.000	APBD		4 jenis	8.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara		6 jenis	5.000.000	APBD		6 jenis	10.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu		81%				82%	
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu		8 dokumen	15.000.000	APBD		8 dokumen	15.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang selesai tepat waktu		2 dokumen	3.500.000	APBD		2 dokumen	3.500.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu		4 dokumen	3.500.000	APBD		4 dokumen	3.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan, Pencegahan dan mitigasi Bencana	Jumlah desa tangguh bencana, Persentase pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai, Persentase Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini/Early Warning System (EWS) bencana		10 desa 80% 75%				12 desa 80% 77%	

Bimbingan teknis kesiapsiagaan / mitigasi bencana	Jumlah pelajar paham tehnik PRB dan Kesiapsiagaan pada Lokasi Rawan Bencana		260 peserta	100.000.000	APBD		260 peserta	150.000.000
Penanganan Mitigasi Struktural pra bencana pada DESTANA	Jumlah kegiatan mitigasi pada lokasi desa rawan bencana		10 desa	50.000.000	APBD		10 desa	200.000.000
Penguatan Kapasitas Relawan Masyarakat penanggulangan bencana	Jumlah Relawan yang mengikuti		30 orang	100.000.000	APBD		120 orang	300.000.000
Pelaksanaan aktivasi posko siaga/darurat bencana	Jumlah posko		2 posko	60.000.000	APBD		2 posko	70.000.000
Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Jumlah desa tangguh yang terbentuk		10 desa	425.000.000	APBD		10 desa	200.000.000
Pengadaan tenda dan perlengkapan	Jumlah tenda dan perlengkapan yang diadakan		7 unit	50.000.000	APBD		7 unit	50.000.000
Pengadaan Peralatan rescue	Jumlah peralatan rescue		7 jenis	220.000			1 paket	120.000.000
Pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Nasional	Jumlah kegiatan dalam Hari Kesiapsiagaan Nasional		4 kegiatan	50.000.000	APBD		4 kegiatan	50.000.000
Diklat teknis penanggulangan bencana (Metode Out bound)	Jumlah peserta diklat		60 org	100.000.000	APBD		60 org	100.000.000
Penyediaan prasarana dasar mitigasi pada penanganan pra bencana	Jumlah prasarana dasar		2 jenis	50.000.000	APBD		2 jenis	50.000.000
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase korban selamat akibat bencana, Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana		70 80				75 82	
Pengadaan prasarana dasar tanggap darurat bencana	Jenis sarana dasar yang disediakan		3 jenis	200.000.000	APBD		3 jenis	200.000.000
Penguatan Sistem Komando Pusat Pengendalian Operasi penanganan bencana	Jumlah tenaga dan kejadian yang tertangani		25 org	600.000.000	APBD		25 org	700.000.000
Operasi Penanganan, Kebakaran hutan dan lahan	Jumlah sarana pendukung kegiatan karhutla yang tersedia		2 jenis	20.000.000	APBD		2 jenis	50.000.000
Operasi Penanganan tanggap darurat kekeringan (dropping air bersih)	Jumlah bantuan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan		2 jenis	200.000.000	APBD		2 jenis	200.000.000

Pemenuhan kebutuhan dasar tanggap darurat	Jumlah bantuan dasar tanggap darurat bencana yang tersedia		2 jenis	60.000.000	APBD		2 jenis	80.000.000
Sarana Prasarana penyediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan	Jumlah prasarana penanganan darurat yang tersedia pada wilayah rawan kekeringan		2 prasarana	450.000.000	APBD		2 prasarana	450.000.000
Pengadaan peralatan rescue	Jumlah peralatan yang dibutuhkan		7 jenis	220.000.000				
Program Peningkatan Kapasitas Penanganan Pasca Bencana	Persentase perbaikan sarana dan prasarana vital daerah terdampak bencana		45%				48%	
Penyediaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah sarana dan pemukiman dampak bencana yang direhabilitasi		5 sarana	50.000.000	APBD		5 sarana	200.000.000
Bimtek penilaian kebutuhan pasca bencana bagi pokja/relawan destana	Jumlah peserta bimtek		44 orang	70.000	APBD		44 orang	70.000

BAB IV

P E N U T U P

1.1. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk maka harus sesuai peraturan perundangan, tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor, serta rasa dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Proses perencanaan pembangunan di Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk telah dituangkan dalam Renstra dan Renja SKPD serta telah dibahas dalam Musrenbang Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 dan ditetapkan dalam Rencana

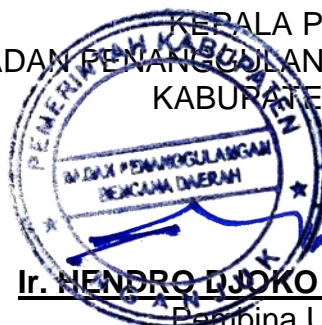
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017.

- c. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya.

1.3. Rencana TindakLanjut

- a. Dalam rangka sinergitas kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang, agar proses keegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Ir. HENDRO DJOKO SOEDARSONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19621105 199403 1 004